Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 11 No. 2, September 2026 (h.685-694)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598

Al-Daulah dalam Kepemimpinan Perspektif Ibnu Khaldun: Analisis terhadap Praktik Kepemimpinan di Indonesia Tahun 2024

Najwa Ashwarina, Khalid
Universitas Islam Negeri Sumatera (UINSU) Medan, Indonesia
Email: najwa0203223105@uinsu.ac.id, khalid@uinsu.ac.id

Abstract

Indonesia's 2024 Presidential Election was marked by controversy surrounding the concentration of power and the practice of political dynasties, which sparked widespread debate over the ethics of constitutional governance. This study aims to analyze the phenomenon of leadership and power in the 2024 Election through Ibn Khaldun's political sociology framework, particularly the concepts of asabiyah and the dynastic cycle, while also comparing them with perspectives on leadership ethics. This study employs a qualitative approach using a literature review method. The research method focuses on collecting data from relevant academic literature and political documents, which are subsequently analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the consolidation of power through kinship relations and elite coalitions in the 2024 Election represents a modern manifestation of asabiyah aimed at maintaining group hegemony. The implications of the strengthening of political dynasties have the potential to undermine the quality of public participation and compromise the integrity of the democratic system. This study concludes that the concentration of power that disregards the principle of justice may ultimately accelerate the cycle of decline of a government. Therefore, strengthening constitutional ethics is essential to maintaining the maturity and quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Political Dynasty, Al-Daulah, Ibn Khaldun, Asabiyah, Leadership Ethics, Indonesian Democracy.*

Abstrak

Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 diwarnai oleh polemik pemusatan kekuasaan dan praktik dinasti politik yang memicu perdebatan luas mengenai etika ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kepemimpinan dan kekuasaan pada Pemilu 2024 melalui kerangka sosiologi politik Ibnu Khaldun, khususnya konsep *asabiyah* dan siklus dinasti, serta membandingkannya dengan pemikiran etika kepemimpinan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Metode penelitian yang diterapkan berfokus pada pengumpulan data dari literatur akademik dan dokumen politik yang relevan, untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan melalui relasi kekerabatan dan koalisi elite pada Pemilu 2024 merupakan manifestasi modern dari *asabiyah* yang bertujuan untuk mempertahankan hegemoni kelompok. Implikasi dari menguatnya dinasti politik ini berpotensi menggerus kualitas partisipasi publik dan mencederai integritas sistem demokrasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemusatan kekuasaan yang mengabaikan asas keadilan pada akhirnya akan mempercepat siklus keruntuhan suatu pemerintahan, sehingga sangat diperlukan penguatan etika ketatanegaraan untuk menjaga kematangan demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: Dinasti Politik, Al-Daulah, Ibnu Khaldun, *Asabiyah*, Etika Kepemimpinan, Demokrasi Indonesia.

Pendahuluan

Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara esensial, kehadiran negara serta sistem kepemimpinannya adalah sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan kolektif, menjaga ketertiban, dan melindungi warga dari berbagai ancaman (Rodli et al., 2021). Dalam praktiknya, pembentukan suatu negara berakar dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan selalu berupaya mengorganisasi diri demi mencapai tujuan bersama (Bakry et al., 2021). Oleh karena itu, kekuasaan hadir sebagai instrumen vital dan wadah formal untuk mengatur jalannya roda pemerintahan agar cita-cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik, termasuk melalui mekanisme pemilihan umum yang idealnya menjamin kedaulatan rakyat (Amir, 2020).

Dalam perkembangan sistem demokrasi modern konsep kepemimpinan seringkali diwarnai oleh fenomena dinasti politik, dimana kekuasaan didistribusikan atau diwariskan di dalam lingkaran kekerabatan yang sama. Dinasti politik dapat berkembang ketika regenerasi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tidak berjalan dengan baik dan demokratis. Selain itu, pilihan calon yang terbatas dan ruang demokrasi yang tertutup dapat menyebabkan tidak adanya calon alternatif selain petahana atau kerabatnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses demokrasi untuk menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas (Khalid, 2023). Meskipun demokrasi meniscayakan adanya partisipasi publik secara luas, realitas menunjukkan bahwa proses pemilihan pemimpin terkadang tidak terlepas dari intervensi keluarga elit dan kuatnya relasi patronase (Susetyawidianta & Geraldy, 2024). Kondisi ini membawa tantangan tersendiri bagi kematangan demokrasi, karena proses pergantian pemimpin berisiko mengabaikan kualitas dan kemampuan (meritokrasi) demi memperkuat dominasi kelompok tertentu. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan dalam sistem kenegaraan yang modern pun masih kerap memakai cara-cara pelanggengan tradisi keluarga. Dalam menilai kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan politik, pengalaman menjalankan jabatan publik juga relevan sebagai salah satu pertimbangan, sebagaimana dibahas oleh Khalid (2023).

Tahun 2024 menjadi momentum krusial bagi sistem perpolitikan Indonesia, terutama dengan diselenggarakannya Pemilihan Presiden yang sarat akan dinamika kompetisi dan kontroversi (Winada et al., 2025). Penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak juga dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi, membebani pemilih dan penyelenggara, serta berimplikasi terhadap kualitas demokrasi (Parapat & Khalid, 2025). Salah satu sorotan yang paling tajam adalah pencalonan figur muda yang difasilitasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon, yang kemudian memicu perdebatan luas mengenai etika hukum, dugaan intervensi

penyelenggara negara, dan praktik *al-daulah* (Sulistyowati et al., 2024). Kemenangan kandidat tertentu juga didorong oleh penguasaan kampanye media sosial yang kuat seperti pemanfaatan platform TikTok dengan strategi konten yang menghibur untuk menarik simpati pemilih Generasi Z serta besarnya dukungan mesin politik (Setiawan, 2024). Realitas ini memperlihatkan persimpangan yang sangat kompleks antara tegaknya aturan hukum, ambisi kekuasaan, dan upaya mempertahankan hegemoni politik dalam lanskap demokrasi Indonesia saat ini, yang juga tercermin kuat dari memanasnya narasi mengenai melandainya indeks demokrasi dalam debat para kandidat (Viranti et al., 2025). Parapat dan Khalid (2025) juga mengkaji persoalan desain pemilu melalui perspektif siyasah dusturiyah, khususnya terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, salah satu intelektual terkemuka yang telah lama mengkaji secara mendalam tentang watak kekuasaan adalah Ibnu Khaldun. Sebagai seorang pemikir besar yang hidup pada abad ke-14, Ibnu Khaldun meletakkan dasar-dasar sosiologi politik dengan menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk berkelompok demi bertahan hidup (Rodli et al., 2021). Pemikirannya lahir dari pengamatan yang tajam terhadap jatuh bangunnya berbagai dinasti dan peradaban pada masa lalu. Ia berkesimpulan bahwa keinginan untuk berkuasa pada dasarnya merupakan tabiat yang melekat pada manusia, yang ditopang oleh kecerdasan berpikir dan hasrat untuk membangun sistem sosial yang lebih besar.

Inti dari teori kekuasaan Ibnu Khaldun terletak pada konsep *asabiyah*, yaitu perasaan solidaritas sosial atau sentimen kekelompokan yang menjadi motor penggerak utama berdirinya sebuah negara. Menurutnya, sebuah dinasti kekuasaan dapat lahir, mencapai masa kejayaan, dan pada akhirnya runtuh, sangat bergantung pada kuat atau lemahnya ikatan solidaritas (*asabiyah*) di antara para pendukungnya (Mahfudoh et al., 2024). Ketika suatu kelompok memiliki ikatan kesetiaan yang luar biasa kuat, mereka mampu merebut kekuasaan dan membentuk dinasti. Namun, seiring berjalannya waktu, gaya hidup mewah dan hilangnya semangat perjuangan perlahan-lahan akan merusak solidaritas tersebut, sehingga *al-daulah* perlahan melemah dan digantikan oleh kelompok baru yang memiliki ikatan jauh lebih solid.

Konsep siklus pemerintahan dan *asabiyah* yang digagas oleh Ibnu Khaldun ini ternyata memiliki daya analisis yang masih sangat relevan untuk membaca fenomena politik kontemporer, termasuk di Indonesia. Solidaritas politik yang dibangun melalui koalisi partai, pergerakan relawan, hingga ikatan kekeluargaan dalam Pemilu 2024 dapat dipandang sebagai bentuk modern dari *asabiyah* yang dirancang untuk meraih puncak kekuasaan (Setiawan, 2024; Winada et al., 2025). Namun demikian, ketergantungan yang berlebihan pada intervensi penguasa dan figur elit tertentu berpotensi menciptakan kekuasaan yang eksklusif, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat (Sulistyowati et al., 2024). Teori Ibnu Khaldun secara tidak langsung mengingatkan bahwa dominasi kekuasaan yang hanya bertumpu pada dinasti atau keluarga rentan mengalami keruntuhan bila mengabaikan rasa keadilan publik.

Berbagai studi terdahulu telah berupaya mengkaji isu kepemimpinan, baik dari sudut pandang pemikiran Islam maupun praktik ketatanegaraan modern. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya nilai-nilai etika, keadilan, dan perjanjian politik (kontrak sosial) dari pemikiran politik Islam klasik sebagai pedoman relevan

bagi tata kelola negara hukum (Nabilah et al., 2024). Di sisi lain, kajian politik masa kini secara spesifik membedah realitas Pemilu 2024 dengan menyoroti kuatnya pengaruh kampanye digital yang mendistorsi substansi politik, kontroversi putusan lembaga hukum terkait sistem pemilu, dan polarisasi publik dalam membentuk pemerintahan yang baru di Indonesia (Amir, 2020; Sulistyowati et al., 2024). Walaupun demikian, mayoritas studi yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dan belum mengintegrasikan teori sosiologi sejarah Islam dengan fenomena spesifik *al-daulah* modern di Indonesia secara utuh.

Berdasarkan paparan dan telaah pustaka tersebut, tampak jelas adanya *research gap* mengenai bagaimana teori Ibnu Khaldun tentang *asabiyah* dan siklus pemerintahan dinasti dapat diaplikasikan sebagai kerangka analisis kritis terhadap praktik kepemimpinan politik di Indonesia pasca-Pemilu 2024. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting karena di tengah krisis identitas dan moralitas politik, masyarakat membutuhkan pemahaman konseptual tentang dampak buruk pemusatan kekuasaan terhadap kelangsungan demokrasi bangsa (Hestuti & Ilyas, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dinasti kekuasaan dalam kepemimpinan Indonesia tahun 2024 melalui pendekatan sosiologi politik Ibnu Khaldun, dengan harapan dapat memberikan refleksi sejarah sekaligus landasan etis bagi perbaikan tata kelola kepemimpinan nasional di masa depan.

Teori Asabiyah Menurut Ibnu Khaldun

Konsep *asabiyah* merupakan pilar fundamental dalam pemikiran sosiologi politik Ibnu Khaldun. Secara etimologis, istilah *asabiyah* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna semangat kolektif, ikatan golongan, atau partai. Dalam kerangka teori Ibnu Khaldun, *asabiyah* didefinisikan sebagai rasa cinta, solidaritas, atau fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, maupun kelompoknya. Perasaan kasih sayang dan ikatan batin ini diyakini sebagai sifat dasar manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang secara alami mendorong setiap individu untuk saling melindungi dan tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Latar belakang kemunculan konsep *asabiyah* pada dasarnya berakar dari pemuliaan terhadap ikatan darah, yang merupakan watak bawaan (*tabi'i*) setiap manusia. Ikatan kekerabatan ini secara alamiah membangkitkan empati yang kuat, sehingga seseorang akan merasa terpanggil dan turut campur tangan untuk membela anggota keluarganya saat menghadapi ancaman atau perlakuan yang tidak adil. Dorongan mendasar ini telah mengakar sejak manusia pertama kali hidup berkelompok. Seiring perkembangan zaman dan peradaban, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ruang lingkup *asabiyah* tidak lagi terbatas pada ikatan darah semata, melainkan meluas menjadi solidaritas sosial masyarakat desa, masyarakat kota, hingga bertransformasi menjadi semangat patriotisme dan nasionalisme di era yang lebih modern.

Dalam proses membangun tatanan politik, *asabiyah* memiliki fungsi yang sangat esensial sebagai motor penggerak utama kekuasaan. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa solidaritas sosial berfungsi penting untuk mencegah konflik, menolak berbagai bentuk ketidakadilan, serta memelihara kebersamaan di tengah keberagaman kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, *asabiyah* merupakan kekuatan pendorong yang memotivasi para pendukung untuk terus maju dan bekerja sama demi mencapai tujuan kolektif. Oleh karena itu, keberadaan

solidaritas kelompok yang kokoh menjadi sebuah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar bagi berdirinya suatu negara atau dinasti pemerintahan yang besar dan berkuasa.

Hubungan antara *asabiyah* dengan kepemimpinan dan terbentuknya *al-daulah* politik sangatlah erat serta tidak dapat dipisahkan. Ibnu Khaldun menguraikan bahwa ketika rasa kebersamaan telah terbentuk kuat dalam suatu kelompok, mereka niscaya membutuhkan kehadiran seorang penguasa atau pemimpin yang mampu menjadi penengah dan menangkal berbagai agresi dari luar (Rodli et al., 2021). Pemimpin tersebut kemudian akan menyatukan potensi kelompoknya, mengonsolidasikan tentara yang loyal, serta menunjuk para pembantu elit untuk menopang kekuasaannya, sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan atau *al-daulah*. Oleh karena itu, sebuah *al-daulah* kekuasaan hanya akan dapat bertahan lama dan besar apabila pemimpinnya mampu menjaga homogenitas serta solidaritas sosial yang kuat di antara para pendukung utamanya.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai *asabiyah* ini terbukti masih memiliki relevansi yang sangat tajam untuk membedah fenomena *Al-daulah* dan kepemimpinan politik di Indonesia pada tahun 2024. Dalam lanskap politik kontemporer, ikatan *asabiyah* telah beralih rupa menjadi bentuk konsolidasi koalisi partai, pergerakan relawan yang masif lintas generasi, serta penguatan dukungan relasi elit politik guna meraih kemenangan pemilu (Setiawan, 2024). Kontroversi putusan kelembagaan yang meloloskan figur anggota keluarga dari pimpinan negara yang sedang berkuasa sebagai kandidat pemimpin nasional dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk memperkuat *asabiyah* kekerabatan demi menjaga keberlanjutan sebuah *Al-daulah* pada pemerintahan yang baru (Sulistyowati et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa ikatan solidaritas patronase dan perlindungan kelompok elit politik masih menjadi instrumen yang sangat vital dalam membangun serta mempertahankan roda kekuasaan di Indonesia saat ini.

Asabiyah dan Siklus Al-daulah pada Pemilu 2024

Konsep *asabiyah* merupakan elemen fundamental dalam sosiologi politik Ibnu Khaldun untuk menjelaskan bagaimana sebuah kekuasaan dapat terbentuk dan bertahan secara historis. Secara alamiah, Ibnu Khaldun meyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan bawaan untuk berkelompok demi memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan hidupnya. Dorongan untuk berkumpul ini melahirkan rasa solidaritas atau ikatan emosional yang sangat kuat (*asabiyah*), yang pada awalnya bersumber dari ikatan darah dan kekerabatan, namun kemudian dapat meluas menjadi ikatan kesamaan identitas sosial, kepentingan, dan tujuan politik.

Ibnu Khaldun secara kritis menjelaskan bahwa *asabiyah* berfungsi sebagai motor penggerak utama bagi sekelompok orang untuk merebut hegemoni dan mendirikan sebuah negara atau pemerintahan. Ketika sebuah kelompok memiliki solidaritas sosial yang kuat, mereka niscaya membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menangkal agresi, menyatukan potensi kelompok, dan mengonsolidasikan kekuatan. Namun, kekuasaan ini tunduk pada hukum siklus alamiah peradaban yang terdiri dari fase kelahiran, pencapaian masa kejayaan, hingga fase kemunduran yang tidak terhindarkan ketika semangat solidaritas perjuangan mulai terkikis.

Dalam upaya mempertahankan kekuasaan dari ancaman keruntuhan, para penguasa sering kali melakukan konsolidasi dengan menempatkan anggota keluarga atau loyalis di berbagai posisi strategis. Transisi ini mengubah sifat kekuasaan dari yang awalnya didukung oleh kerja sama yang luas, menyempit menjadi kekuasaan eksklusif berbasis *Al-daulah* keluarga. Fenomena ini merupakan strategi sosial-politik yang pragmatis untuk memastikan bahwa tampuk kepemimpinan dan kontrol negara tidak jatuh ke tangan kelompok saingan yang memiliki *asabiyah* baru.

Jika dianalisis menggunakan teori Ibnu Khaldun, fenomena Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 di Indonesia memperlihatkan pola kerja *asabiyah* yang sangat nyata di lapangan. Manuver politik para elite, termasuk polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi figur muda dari keluarga presiden yang sedang berkuasa, dapat ditafsirkan sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan untuk mempertahankan dominasi *Al-daulah* politik. Ikatan solidaritas dalam kontestasi ini tidak lagi sekadar berbasis pertalian darah murni, melainkan bermanifestasi secara kuat dalam bentuk penggalangan koalisi elite untuk meraih kemenangan.

Relevansi teori klasik Ibnu Khaldun terhadap politik modern Indonesia menunjukkan bahwa esensi perebutan kekuasaan pada tataran sosiologis memiliki pola yang berulang. Meskipun sistem pemerintahan telah dibungkus oleh instrumen prosedural demokrasi modern, fondasi keberhasilan kandidat dalam Pemilu 2024 tetap sangat bergantung pada seberapa masif sentimen *asabiyah* yang dibangun. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan untuk memusatkan dan melanggengkan kekuasaan kelompok masih menjadi kekuatan pendorong utama dalam lanskap politik kontemporer di Indonesia.

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik, gagasan mengenai kepemimpinan negara dikaji secara mendalam oleh Ibnu Khaldun. Ia menawarkan pendekatan yang murni sosiologis dan empiris dalam melihat proses terbentuknya sebuah kepemimpinan. Menurut teori sosiologinya, negara dan otoritas kepemimpinan adalah suatu keniscayaan sosial yang lahir dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, yang diwujudkan melalui kekuatan dominasi *asabiyah* (solidaritas sosial). Ibnu Khaldun secara realistis mengamati bahwa sebuah kekuasaan, baik yang mengintegrasikan nilai agama maupun tidak, hanya bisa tegak secara kokoh jika ditopang oleh kelompok solidaritas yang memiliki kekuatan riil di lapangan.

Terkait syarat dan kualifikasi seorang pemimpin, Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang berpijak teguh pada realitas sosial masyarakat. Meskipun ia tetap mengakui pentingnya kualifikasi moral dan keadilan bagi seorang penguasa, secara tegas ia menekankan bahwa kualifikasi terpenting dari seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam menyatukan dan mengendalikan kekuatan *asabiyah*. Kemampuan ini dinilai sangat esensial agar masyarakat luas bersedia bekerja sama, tunduk pada otoritas, serta mampu mempertahankan stabilitas negara dari ancaman perpecahan.

Bagi Ibnu Khaldun, pengakuan logis terhadap kehadiran seorang pemimpin secara fungsional mutlak diperlukan untuk mencegah kekacauan (*chaos*) dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam analisisnya, ia sangat

menitikberatkan pada realitas historis mengenai bagaimana tampuk kekuasaan itu secara faktual direbut, dikelola, dan dipertahankan. Siklus kekuasaan ini selalu berputar dan sangat bergantung pada kuat atau lemahnya sentimen pengelompokan yang mengikat elit penguasa dengan para pengikutnya.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun ini terhadap praktik politik kontemporer di Indonesia sangatlah tajam. Teori *asabiyah* mampu membedah realitas pragmatis politik modern, termasuk dinamika pada Pemilu 2024, di mana pertarungan kekuasaan pada kenyataannya jauh lebih banyak ditentukan oleh besarnya kekuatan koalisi elit, konsolidasi mesin politik, dan perlindungan relasi kekerabatan dibandingkan sekadar pemenuhan idealitas normatif. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan pengelompokan dan solidaritas kekuasaan masih menjadi determinan paling utama dalam sirkulasi kepemimpinan dan arah demokrasi di Indonesia.

Implikasi Al-daulah Politik Terhadap Demokrasi Indonesia

Fenomena konsolidasi *Al-daulah* politik yang mengemuka dengan kuat pada kontestasi Pemilu 2024 membawa implikasi yang mendalam dan serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Praktik pemusatan kekuasaan pada lingkaran keluarga tertentu cenderung secara sistematis menciptakan ketidaksetaraan arena bermain bagi para peserta pemilu lainnya dalam ruang demokrasi. Ketika struktur aparatur negara diduga berafiliasi untuk mendukung keberlanjutan kekuasaan kelompok tertentu, esensi demokrasi konstitusional yang mensyaratkan pemilu dilaksanakan secara langsung, jujur, dan adil menjadi sangat tercederai.

Kekuasaan elite yang terpusat ini juga pada gilirannya memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat secara substansial. Meskipun warga negara tetap memberikan suaranya di bilik suara, polarisasi tajam yang dipicu oleh dugaan rekayasa prosedural hukum menciptakan iklim skeptisisme publik terhadap integritas penyelenggara negara. Hal ini secara kritis menandakan bahwa dominasi *Al-daulah* politik berpotensi menggerus kualitas kepercayaan rakyat terhadap sistem institusi demokrasi itu sendiri.

Dari sudut pandang etika ketatanegaraan yang ideal, langgengnya dinasti politik melalui pemanfaatan celah regulasi sering kali bertentangan secara diametral dengan tata kelola pemerintahan yang etis. Pengangkatan figur pemimpin yang difasilitasi oleh polemik putusan hukum menjelang Pemilu 2024 secara jelas mengindikasikan adanya krisis etika di tingkat elite penguasa. Alih-alih mengedepankan kompetensi objektif dan akuntabilitas publik sebagaimana diidealkan dalam etika kepemimpinan politik Islam, institusi kekuasaan justru rentan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan pragmatis.

Jika dianalisis melalui lensa sosiologi politik Ibnu Khaldun, upaya masif para elite untuk melanggengkan kekuasaan keluarganya sejatinya merupakan fase historis yang alamiah dalam mempertahankan eksistensi pemerintahan melalui instrumen *asabiyah*. Namun, Ibnu Khaldun juga memberikan preskripsi kritis bahwa ketika sebuah kelompok mulai mengabaikan asas keadilan menyeluruh dan memicu perpecahan, maka fondasi sosial negara tersebut akan rapuh. Ketidakadilan prosedural pada akhirnya akan menggerus *asabiyah* penguasa itu sendiri dan mempercepat siklus keruntuhannya.

Implikasi dari fenomena politik yang sarat kontroversi ini terhadap masa depan demokrasi Indonesia sangatlah krusial untuk dievaluasi. Jika praktik *Al-*

daulah kekuasaan yang secara pragmatis mengesampingkan etika ketatanegaraan terus berjalan tanpa pengawasan kelembagaan yang kuat, maka demokrasi Indonesia hanya akan menyusut menjadi instrumen formalitas belaka. Oleh karena itu, pasca-Pemilu 2024 diperlukan komitmen penguatan sistem ketatanegaraan agar nilai-nilai integritas dan keadilan dapat kembali menjadi pijakan utama dalam sirkulasi kepemimpinan nasional.

Kesimpulan

Al-daulah yang muncul pada lanskap kepemimpinan Indonesia tahun 2024 merupakan manifestasi nyata dari konsep *asabiyah* atau solidaritas kelompok yang digagas oleh Ibnu Khaldun. Konsolidasi kekuasaan yang terjadi tidak sekadar didorong oleh mekanisme elektoral biasa, melainkan ditopang kuat oleh ikatan kekerabatan, aliansi koalisi elit politik, serta pengerahan mesin relawan yang terstruktur, sehingga solidaritas patronase tersebut berhasil menjadi motor penggerak utama dalam mengamankan dan mempertahankan hegemoni kekuasaan, meskipun proses pembentukannya diwarnai oleh berbagai kontroversi hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori sosiologi politik klasik mengenai pembentukan *Al-daulah* masih sangat relevan untuk menjelaskan anatomi politik modern, khususnya dalam melihat bagaimana solidaritas kelompok dapat menjadi instrumen dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun *asabiyah* terbukti efektif sebagai instrumen perebutan kekuasaan, realitas politik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan terhadap etika ketatanegaraan karena dominasi *asabiyah* kekerabatan cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi, kapasitas, keadilan, serta integritas demi menjamin keberlanjutan kekuasaan kelompoknya. Ketidakselarasan antara etika normatif kepemimpinan dan realitas pragmatis perebutan kekuasaan tersebut mencerminkan sebuah ironi dalam tata kelola negara yang seharusnya berlandaskan pada kemaslahatan publik, bukan sekadar kepentingan elit. Menguatnya *Al-daulah* juga membawa tantangan serius bagi keberlangsungan kualitas sistem demokrasi di Indonesia, sebab pemusatan kekuasaan yang bertumpu pada lingkar keluarga dan koalisi elit dominan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan antarlembaga serta mencederai asas keadilan dalam kontestasi politik. Demokrasi yang secara prosedural telah berjalan melalui instrumen pemilihan umum dapat kehilangan makna substansialnya apabila hukum dan konstitusi rentan dimodifikasi untuk melegitimasi ambisi pihak tertentu. Jika praktik pemusatan kekuasaan semacam ini terus dinormalisasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi negara berpotensi mengalami kemerosotan. Pada akhirnya, kelangsungan sebuah kepemimpinan selalu tunduk pada siklus peradaban sebagaimana peringatan historis Ibnu Khaldun, bahwa sebuah dinasti kekuasaan dapat berdiri tegak dan mencapai puncak kejayaannya melalui kekuatan solidaritas kelompok yang solid, tetapi kekuasaan tersebut akan melemah apabila para elitenya terjebak dalam kemewahan kekuasaan dan mengabaikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, fenomena kepemimpinan nasional saat ini harus menjadi refleksi kritis bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal jalannya roda pemerintahan, agar tata kelola negara ke depan dapat kembali bertumpu pada jalur etika yang sehat, adil, berintegritas, serta berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Referensi

Amir. (2020). Kekuasaan dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. In Dinamika Politik Indonesia (p. 45).

Bakry, K., Abbas, A. H., Ashar, A., & Hamid, A. N. (2021). Konsep kepemimpinan negara Islam (Studi komparasi pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 7*(1), 1–19.

Firdaus, R., Widodo, L., Lubis, A. D. S., Ilham, A. S., & Nasutions, A. Z. (2024). Teori kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan implikasinya di era modern. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies, 2*(2), 258–279.

Hestuti, E., & Ilyas, M. (2025). *Pendidikan karakter kepemimpinan Islam berbasis sejarah: Telaah nilai-nilai Shalahuddin al-Ayyubi dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis*. Tahta Media Group.

Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(9), 462–469.

Khalid. (2023). The experience of political office as a reason for proficiency. *Jurnal Akta, 10*(3), 173–184. https://doi.org/10.30659/akta.v10i3.33881

Mahfudoh, S. A., Rohmawati, U. B., & Mamlu'ah, A. (2024). Analisis khilafah dalam pandangan politik Ahl al Sunnah wa al Jama'ah di Indonesia. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 14*(2), 262–280.

Nabilah, A. A., Gusnata, G., & Kurniati, K. (2024). Relevansi pemikiran etika politik Islam Al-Mawardi terkait kepemimpinan dalam era kontemporer. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2*(2), 193–201.

Parapat, A. R., & Khalid. (2025). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah perspektif siyasah dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4*(1), 527–537. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.931

Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Grasindo.

Rodli, I. M., Ulfa, A., & Muda, H. I. (2021). Konsep negara dan kekuasaan dalam pandangan politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Review Politik, 11*(2), 97–112.

Setiawan, I. (2024). Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024. *Jurnal Aspirasi, 14*(2), 111–117.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan presiden tahun 2024 terhadap politik dan demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(1), 11–20.

Susetyawidianta, R. D., & Geraldy, G. (2024). Political branding Prabowo-Gibran dalam pemilu presiden 2024: Analisa interaksionisme simbolik di media sosial Instagram dan Twitter. *Sintesa: Jurnal Ilmiah Kajian Komunikasi, 3*(1), 114–128.

Viranti, A., Firmansyah, D., & Devi, A. (2025). Analisis framing pemberitaan debat calon presiden Pemilu 2024 pada media online Detik.com dan Liputan6.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(5.C), 1–8. https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10378

Winada, K., Damsar, D., & Alfiandi, B. (2025). Pemahaman pemilih tentang pasangan calon presiden tahun 2024: Studi pemahaman pemilih Gen Z terhadap

pasangan calon presiden dalam Pemilu 2024 di Kota Padang. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 11*(1), 13–26. https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.740

Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.